

**Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan MA No.347 K/Pid.Sus/2016)**

TESIS

Oleh:

SRI WIDIMAHENDRATI

201720252006



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana
Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
(Studi Kasus Putusan MA No.347 K/Pid.Sus/2016)

Nama Mahasiswa : SRI WIDIMAHENDRATI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252006

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian : 22 Juli 2021

Jakarta, 28 Juli 2021
MENGENAL

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN : 0319046403

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN : 0316077604

Penguji II : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
NIDN : 0325117405

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Lusiana Sulastri, S.H., M.H.
NIDN : 0127117401

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN : 0312117102

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Judul Tesis : Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana
Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
(Studi Kasus Putusan MA No.347 K/Pid.Sus/2016)

Nama Mahasiswa : SRI WIDIMAHENDRATI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252006

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 28 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H
NIDN : 0319046403

Dr. Noviriska, S.H., M.Hum
NIDN : 0325117405

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa ;

Tesis yang berjudul ;

Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan MA No.347 K/Pid.Sus/2016)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 28 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



SRI WIDIMAHENDRATI

201720252006

ABSTRACT

SRI WIDIMAHENDRATI, 201720252006, Unlawful Elements in Criminal Acts of Corruption Based on Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Law Number 20 of 2001 (Case Study of Supreme Court Decision No. 347 K/Pid.Sus/2016).

Eradication of criminal acts of corruption is closely related to the formulation of policies in law enforcement, especially criminalization, namely the element of violating the law. Many mistakes are made by lawmakers in formulating the articles in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, giving rise to different interpretations from law enforcement officials which lead to legal uncertainty in law enforcement of criminal acts of corruption. The purpose of writing this thesis is to find out and analyze the elements against the law in Article 2 paragraph (1) and how the Panel of Judges applies the law to the interpretation of the elements of unlawful acts in Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in the Decision of the Supreme Court Number: 347 K/Pid.Sus/2016.

The act of enriching oneself, another person or the corporation of the perpetrator is clearly contrary to the prevailing laws and regulations and is contrary to the sense of propriety and justice in society, because the act of the perpetrator to enrich himself or another person or the corporation is carried out with using state money so that the state is harmed and can result in disruption of the state economy. Legislators should clarify who is the subject of Article 2 paragraph (1) of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption is only aimed at civil servants, state administrators or state officials who abuse their authority and Article 2 paragraph (1) should not focus on elements "enriching" and "profitable" but more focused on the perpetrators whether there are elements of against the law.

Keywords: *Unlawful Elements, Corruption, Injustice.*

ABSTRAK

SRI WIDIMAHENDRATI, 201720252006, Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan MA No.347 K/Pid.Sus/2016).

Pemberantasan tindak pidana korupsi ini berhubungan erat dengan kebijakan formulasi dalam penegakan hukum khususnya kriminalisasi yakni perihal unsur melawan hukum. Banyak kesalahan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dari aparat penegak hukum yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penulisan Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan bagaimana penerapan hukum oleh Majelis Hakim terhadap penafsiran unsur perbuatan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 347 K/ Pid.Sus/2016.

Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau juga korporasi pelaku ini jelas-jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan rasa kepatutan dan keadilan dalam masyarakat, karena perbuatan pelaku untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau juga korporasi itu dilakukan dengan menggunakan uang negara sehingga negara dirugikan dan dapat mengakibatkan terganggunya perekonomian negara. Pembuat undang-undang seharusnya memperjelas siapa saja yang menjadi subjek Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya ditujukan kepada pegawai negeri, penyelenggara negara, atau pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya dan seharusnya Pasal 2 ayat (1) tidak terfokus kepada unsur “memperkaya” dan “menguntungkan” tapi lebih terfokus kepada pelaku apakah ada unsur melawan hukum.

Kata Kunci : *Unsur Melawan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Ketidakadilan.*

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikumwarahmatullaahwabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis memilih judul: Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan MA No.347 K/Pid.Sus/2016). Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir dalam menjalankan Pendidikan Program Studi Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam pembuatan tesis ini, tentunya penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. H. Erwin OwanHermansyah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Satu (I) Tesis.
4. Dr. Noviriska, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Dua (II) Tesis.
5. Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh CivitasAkademika yang telah berperan penting dalam proses pendidikan ini.
6. Rekan-rekan saya, Keluarga Besar Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulisan Tesis ini.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Pardiharto (alm) dan Ibu Masri'ah (almh) yang semoga selalu memberikan do'a dalam menyelesaikan pendidikan S2 ini.

8. Kepada Suami Tercinta dan 3 (tiga) anak tersayangku yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan S2 ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penelitian tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini, Akhirnya, seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak tesis inipun jauh dari sempurna.

Wassalaamu'alaikumwarahmatullaahwabarakaatuh.

Bekasi, 28 Juli 2021

SRI WIDIMAHENDRATI



DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah	
1.2.1. Identifikasi Masalah	13
1.2.2. Rumusan Masalah	13
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1. Tujuan Penelitian	14
1.3.2. Manfaat Penelitian	14
1.4.Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran	
1.4.1. Kerangka Teori	15
1.4.2. Kerangka Pemikiran	23
1.5.Metode Penelitian	
1.5.1. Jenis Penelitian	24
1.5.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.5.3. Sumber Data	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana.	
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana	28
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana	29
2.2. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	32
2.3. Perbuatan Melawan Hukum Pidana	34

2.4 Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi	36
2.5 Penafsiran Hakim Terhadap Sifat Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	45
BAB III PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PASAL 2 AYAT (1) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001	
3.1 Penafsiran Unsur ‘Melawan Hukum’ Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	51
3.2 Pengertian ‘ Melawan Hukum’ dalam arti materiil dengan fungsi positif	52
3.3 Pendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	55
3.4 Pendapat Berdasarkan Doktrin	59
3.5 Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU Tipikor	61
BAB IV PENERAPAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM TERHADAP PENAFAKIRAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 347 K/ PID.SUS/2016	
4.1 Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.	76
4.2 Kasus Posisi Prof. Dr. IrPrawoto, M.SAE	88
4.3 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dilihat Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	99
4.4 Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan	111
4.5 Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi	114
4.6 Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor	116
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	124

5.2 Saran.....	125
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

